



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

PENGUMUMAN

Nomor : 3487/SEK/PENG.KP1.1.6/XI/2023

TENTANG

**MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DENGAN CAT
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2023**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3187/M.SM.01.00/2023 tanggal 22 November 2023 hal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan materi pokok soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
1.	Ahli Pertama Pranata Peradilan	Kemampuan Umum:
		1. Pasal 24 UUD 1945
		2. UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
		3. UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
		4. UU 11/2012
		5. UU 2/1986 jo. 49/2009
		6. UU 7/1989 jo. UU 3/2006
		7. UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009
		8. UU 30/2014
		9. UU 31/1997
		10. Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
		Kemampuan Khusus:
		1. Peraturan Menteri PANRB 26/2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
		2. Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Militer, Hukum Acara Peradilan TUN
		3. KUHP, KUHPerdata (umum), UU diluar KUHP/KUHPerdata (khusus), Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Qonun Aceh, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
		4. Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN
		5. Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin)
6. Sistem pembuktian dalam empat lingkungan badan peradilan		
7. Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)		
2.	Klerik Analis Perkara Peradilan	Kemampuan Umum:
		1. Pasal 24 UUD 1945
		2. UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
		3. UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
		4. UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum)
		5. UU 7/1989 jo. UU 3/2006 (Peradilan Agama)



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6. UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009
		7. UU 30/2014 (Peradilan TUN)
		8. UU 31/1997 (Peradilan Militer)
		9. UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor)
		10. UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial)
		11. UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan)
		12. UU 37/2004 (Pengadilan Niaga)
		13. UU 26/2000 (Pengadilan HAM)
		14. UU 11/2012 (Pengadilan Anak)
		15. UU 14/2002 (Pengadilan Pajak)
		16. UU 3/2006 (Mahkamah Syar'iyah)
		Kemampuan Khusus:
		1. Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
		2. Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)
		3. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)
		4. Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
		5. Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
		6. KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik
		7. Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata
		8. Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)
		9. Sistem pembuktian dalam perkara pidana
		10. Sistem pembuktian dalam perkara perdata
		11. Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
		12. Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)
		13. Bantuan hukum (Posbakum)
		14. Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
		15. Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipedomani.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2023

Pt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Selaku
Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,



Sugiyanto